

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep periode 2016-2021 merupakan acuan bagi DPM & PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2016-2021 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Penetapan tujuan/sasaran SKPD, kebijakan, program/kegiatan beserta sasaran/indikator kinerja/target kerjanya dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Periode 2016-2021 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai penyelenggara perizinan dan fasilitator penanaman modal serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja Pelaksanaan Renstra dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra setiap tahunnya, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu Satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program-program yang termuat dalam Renstra Periode 2016-2021 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya rencana startegis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2016-2021 dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (turbulence). Untuk itu berbagai Penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya good governance.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
1. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	8
2. Struktur Organisasi	13
3. Sumber Daya SKPD	15
4. Kinerja Pelayanan SKPD	17
5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
1. Identifikasi Permasalahan	27
2. Telaahan Visi dan Misi	28
3. Telaahan Renstra Provinsi dan Kabupaten	33
4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	34
5. Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	37
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	37
2. Strategi dan Kebijakan	38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
5.1 Program dan Kegiatan	43
5.2 Indikator Kinerja	46
5.3 Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	63
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	79
BAB VII PENUTUP	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Bagan Struktur Organisasi.....	14
---------	--------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Beberapa Tahun Terakhir.....	20
----------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2	Daftar Sarana Prasarana Yang Mendukung Kegiatan Pelayanan Perizinan DPM&PTSP Kab. Sumenep	16
Tabel 3	Pencapaian Indikator Sesuai Dengan RPJMD Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	19
Tabel 4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021	31
Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja RENSTRA	37
Tabel 6	Strategi RENSTRA 2016-2021	39
Tabel 7	Arah Kebijakan RENSTRA 2016-2021	41
Tabel 8	Daftar Program dan Kegiatan	43
Tabel 9	Target Kinerja Program dan Kegiatan	47
Tabel 10	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	64
Tabel 11	Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep secara normatif merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional didalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan sesuai pula dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RENSTRA ini, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk Tahapan dan Tatacara Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang direncanakan oleh Bupati Sumenep yang dituangkan dalam RPJMD 2016 – 2021.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 tahun 2016, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, pengolahan data dan system informasi penanaman modal;
4. Pelaksanaan penyusunan program kerja
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses perizinan;
7. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian perizinan;
8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati..

Selanjutnya kita sadari bersama bahwa salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan yang belum memberikan dukungan yang maksimal bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha secara optimal. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem pelayanan perizinan yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur khususnya yang membidangi pelayanan masyarakat. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu dengan membentuk lembaga/organisasi baru yakni Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada hakekatnya adalah merupakan salah satu upaya korektif terhadap kondisi pelayanan yang selama ini belum berpihak kepada kepentingan masyarakat menuju kepada Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang berpihak kepada rakyat, prima, berkualitas dan berkesinambungan yang dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi. Berdasarkan design kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sumenep, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumenep difokuskan pada 6 (enam) aspek yaitu :

1. Aspek penguatan kelembagaan perizinan;
2. Aspek peningkatan pelayanan;
3. Aspek peningkatan kompetensi aparatur DPM&PTSP;
4. Aspek pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan;
5. Aspek penerapan teknologi informasi;
6. Aspek sarana dan prasarana;

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016– 2021, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupataan/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintrah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pelayan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);
26. Peraturan Daerah kabupaten sumenep nomor 09 tahun 2011Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sumenep Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomo 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep;
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021, adalah:

- a. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.
- b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP Kabupaten Sumenep.
- c. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.
- d. Memberikan pedoman Pemerintah, masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan program pembangunan daerah lima tahunan secara sinergi dan berjenjang.
- e. Sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra - SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen strategis perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sasaran program RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021.

Sistematika penulisan Renstra - SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan;
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan, SKPD, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;
- Bab III : Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi berisi tentang Identifikasi permasalahan, Telaahan Visi dan Misi, Telaahan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentu Isu-Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan, berisi tentang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, terdiri atas:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
- C. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Dan Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
- D. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan.
- E. Bidang Perizinan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin
 - 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, adalah :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, Pengolahan Data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
- f. Pelaksanaan koordinasi proses Perizinan;
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Perizinan;
- h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, pengolahan data dan system informasi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi proses perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian perizinan;
 - h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. SEKRETARIS

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang umum dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikn oleh Sekretaris.
- B. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan :
Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan mempunyai tugas
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikn oleh Sekretaris.

III. BIDANG PENANAMAN MODAL

- 1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program

kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanaman modal.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanaman modal;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penanaman modal;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang penanaman modal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Pengembangan Dan Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengembangan dan pembinaan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan dan pembinaan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal

Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang promosi investasi dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang promosi investasi dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN

- 1) Bidang Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pengendalian dan penyuluhan teknis Perizinan, penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan

teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang Pengolahan Data.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- B. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan :
Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan mempunyai tugas
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Informasi dan Penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Informasi dan Penyuluhan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

V. BIDANG PERIZINAN

- 1) Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Perizinan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Bidang Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan;

- b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Perizinan;
 - c. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Perizinan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Seksi Pendaftaran dan Penelitian izin
- Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin mempunyai tugas :
- a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Pendaftaran dan Penelitian Izin;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pendaftaran dan Penelitian Izin; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- B. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin
- Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin mempunyai tugas :
- a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Penetapan dan Penerbitan Izin;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Penetapan dan Penerbitan Izin; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

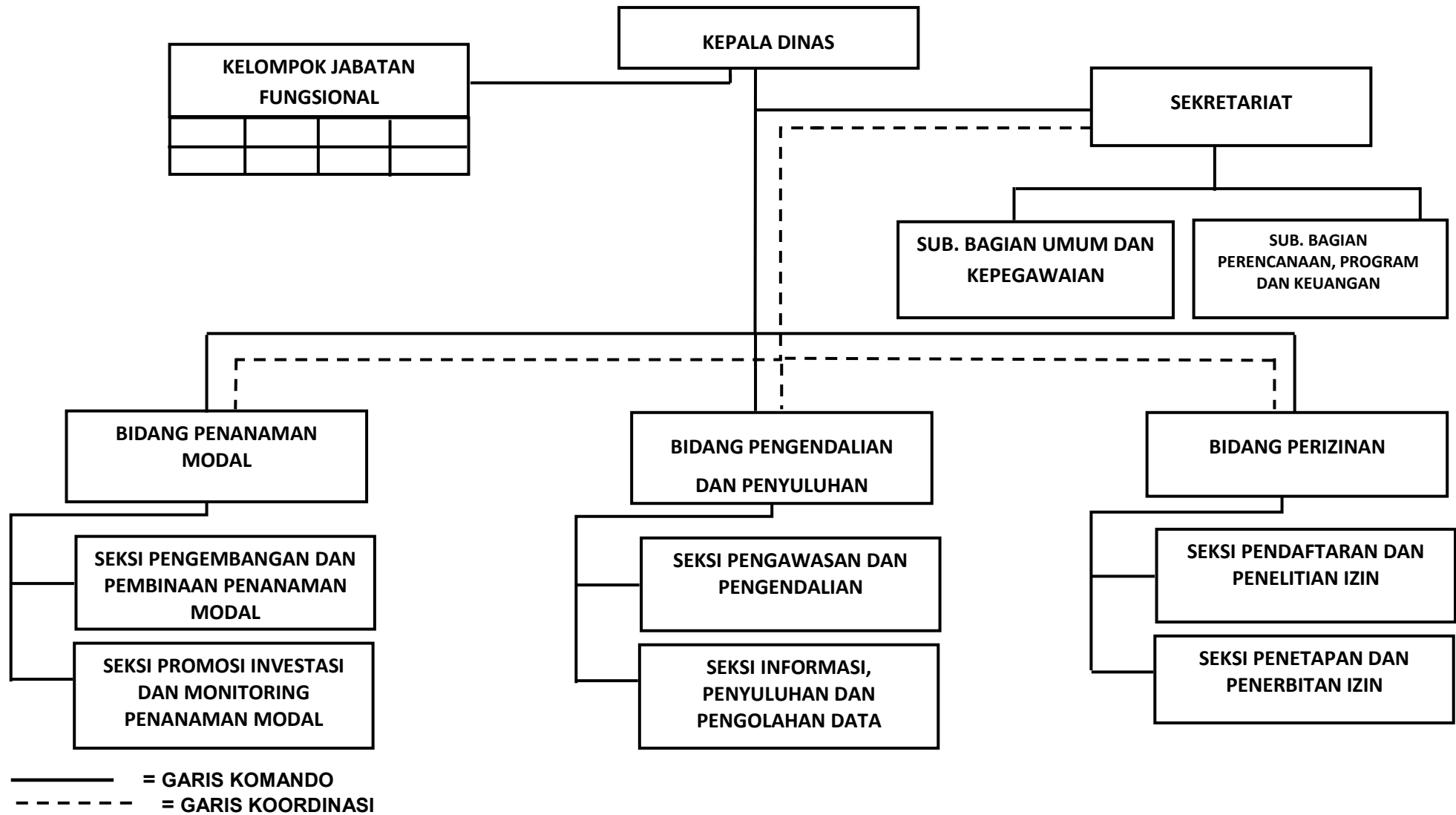
VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPM&PTSP berdasarkan PERDA Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana bagan struktur dibawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep saat ini diantaranya adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 50 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana tempat kerja saat ini pegawai yang ada berjumlah 44 orang termasuk tenaga outsourcing sebagai Administrasi Perizinan 3 (tiga) orang, Cleaning Service 2 (dua) orang, Driver 2 (dua) orang dan Penjaga Malam 2 (dua) orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep per 31 Juni 2016 sebanyak 36 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan S-2	10 Orang
2	Tamatan S-1	13 Orang
3	Tamatan D-3	1 Orang
4	Tamatan SLTA/Sederajat	11 Orang
5	Tamatan SMP	1 Orang
6	Tamatan SD / Sederajat	-
Jumlah Keseluruhan		36 Orang

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Daftar Sarana Prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Kendaraa roda 4	Unit	5
2	Kendaraa roda 2	Unit	11
3	Meja kerja eselon	Unit	17
4	Meja kerja staf	Unit	23
5	Meja rapat segi empat	Unit	6
6	Meja rapat 1/4 lingkaran	Unit	2
7	Kursi tamu	Unit	2
8	Kursi eselon	Unit	17
9	Kursi staf	Unit	23
10	Kursi putar	Unit	4
11	Kursi rapat	Unit	70
12	Kursi pimpinan rapat	Unit	1
13	Kursi tunggu	Unit	2
14	Almari	Unit	12
15	Brankas	Unit	2
16	Fiiling cabbit	Unit	9
17	Komputer/PC	Unit	20
18	Note Book	Unit	6
19	Laptop	Unit	1
20	Printer	Unit	17
21	Mesin ketik	Unit	2
22	Horden	Unit	1
23	Kipas angin	Unit	7
24	Mesin penghancur kerta	Unit	5
25	Pemotong rumput	Unit	2
26	AC	Unit	14
27	Lemari es	Unit	2
28	Televisi	Unit	6
29	Tangga	Unit	2
30	Kotak pengaduan	Unit	1
31	Rak TV	Unit	2
32	Papan informasi	Unit	2
33	Mesin laminating	Unit	1
34	Scanner	Unit	3
35	Papan informasi elektronik	Unit	1
36	Papan informasi/nama	Unit	5
37	Wireles Router	Unit	1
38	Komputer mainframe/server	Unit	2
39	UPS/stabilizer	Unit	3

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
40	Scanner	Unit	2
41	Mesin genset/generator	Unit	1
42	Camera digital	Unit	5
43	Handycam	Unit	1
44	Faximili	Unit	1
45	Wireles	Unit	2
46	Projektor	Unit	1
47	Audio sound system	Unit	1
	JUMLAH		327

4. Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 9 fungsi mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas DPM&PTSP sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program selama tahun anggaran 2015.

a. *Pelayanan Perizinan*

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep bertekad untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kinerja pelayanan melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPADU). Sistem Informasi Teknologi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep meliputi :

1. Aplikasi Perizinan
2. Website.
3. Digital Fice dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) maupun pelayanan perizinannya secara langsung karena tidak ada jaringan sistem informasi elektronik di wilayah pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 53 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep, meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan penarikan retribusi perizinan merupakan aplikasi pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan tepat serta secara transparan.

b. Jenis Perizinan

Saat ini telah ada 28 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diantaranya sebagai berikut :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lokasi (dibawah 1 Ha)
3. Izin Prinsip
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)
10. Izin Kesehatan Meliputi;
 - a. Izin Klinik Utama,
 - b. Izin Rumah Sakit kelas C dan D,
 - c. Izin Rumah Sakit khusus kelas A, B, dan C,
 - d. Izin Apotek,
 - e. Izin Toko Obat,
 - f. Izin Toko Alat Kesehatan,
11. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja,
12. Izin Pembudidayaan Perikanan,
13. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP),
14. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau,
15. Izin Tontonan,
16. Izin Pengumpulan Uang/Barang,
17. Izin Reklame/Media Luar Ruang,

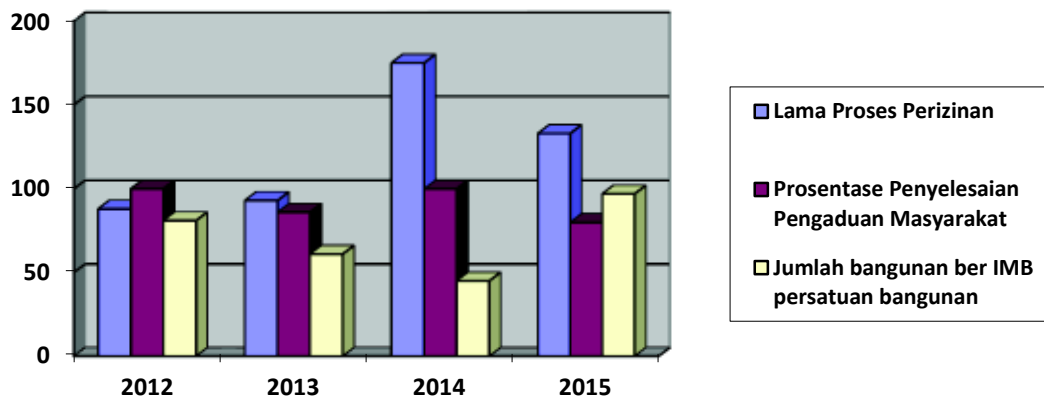
18. Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station (Kekayaan bersih >50 Juta)
19. Izin Penebangan Pohon Pemerintah,
20. Izin stren Kali,
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi;
 - a. Izin Usaha Jasa Boga,
 - b. Izin Hotel/ Penginapan/ Rumah Kost,
 - c. Izin Salon,
 - d. Izin Biro Jasa Travel,
22. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan,
23. Izin Usaha angkutan Darat,
24. Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM),
26. Izin Rencana Tapak/ Site plan,
27. Izin Perubahan Penggunaan Tanah/ Alih Fungsi Lahan,
28. Izin Usaha Peternakan,

Table 3

Table Pencapaian Indikator Sesuai Dengan RPJMD
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2015
Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi 2012	Capaian 2012	Realisasi 2013	Capaian 2013	Realisasi 2014	Capaian 2014	Realisasi 2015	Capaian 2015
Lama Proses Perizinan	17	88,23	15	93,33	8	175	6	133,33
Jumlah Masyarakat yang mengakses pelayanan perizinan melalui website	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	6	100		85,71	100	100	100	80
Jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan	375	81	292	61	217	45	366	97,6

Grafik 1
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2015
Dengan Beberapa Tahun Terakhir



Tabel dan grafik di atas menggambarkan perkembangan realisasi dan capaian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan tabel atas, dapat digambarkan bahwa realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 walaupun tidak mencapai target yang diharapkan namun menunjukkan hasil yang memuaskan **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2015**

Indikator sasaran ini yang ditargetkan 375 atau target RPJMD 375 bangunan yang ber-IMB dapat direalisasikan 366 bangunan yang ber-IMB dengan capaian 97,6 % atau sudah terrealisasi dengan baik , atau tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dimana dalam penyebaran informasi melalui media elektronik dan pameran ini lebih besar dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat karena dapat berhubungan langsung dengan masyarakat seperti dialog interaktif, dialog khusus, siaran langsung melalui media radio sehingga hal ini mempengaruhi capaian kinerja pada kegiatan ini.

5. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

a. **Tantangan**

- Smart City

Saat ini Kota-kota besar di Indonesia mulai menggagas konsep Smart City untuk menghadapi ranah teknologi Internet of Things.

Pembangunan fasilitas umum yang mulai dibangun dengan canggih. Lalu mudahnya masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintahan merupakan upaya tahap pembangunan menuju Smart City.

Tapi, bukanlah hal yang mudah untuk membangun Smart City yang efektif di Indonesia. Ada 3 tantangan yang harus dihadapi.

1. Kebutuhan Data Governance

Ketika Smart City telah dibangun di Kota tersebut, maka akan banyak data yang terkumpul dari berbagai sistem. Masalahnya, data data tersebut siapakah yang berhak untuk mengaksesnya? Apakah pemerintah kota? Pemilik property? Atau penyedia layanan cloud? Lalu siapakah yang berhak mengamankan data data tersebut? Ini merupakan hal yang penting. Sebaiknya pemerintah harus ikut serta dalam memandu konsep smart City yang dibangun dengan membuat framework tersendiri agar efektif dalam pengolahan data dan governance.

2. Kebutuhan Koneksi

Koneksi/jaringan merupakan hal yang penting untuk membangun Smart City. Seperti teknologinya yaitu Internet of Things. Maka membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menjadikan Kota pintar. Jadi pemerintah harus ikut berperan dalam melobby para pelaku industri IoT untuk konektivitas broadband yang merata dan handal.

3. Kebutuhan Standarisasi

Standarisasi sangat dibutuhkan untuk bisa diterapkan dengan benar di wilayahnya masing masing. Selain itu standarisasi ini berguna untuk memadukan proses serta pengelolaannya. Juga yang terpenting, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menikmati smart city secara efektif untuk mendukung segala aktifitas kota menjadi lebih baik lagi.

- Era Digital

Dalam bidang ekonomi perekonomian suatu negara teknologi digital mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi di era digital, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan

yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Akan tetapi tantangan era digital tidak bisa kita pungkiri lagi. Di bidang ekonomi tantangan akan muncul contohnya dalam perindustrian musik di Indonesia banyak sekali terjadi pembajakan atau plagiat dari berbagai karya yang original. Sehingga ini menjadi tantangan dalam perindustrian musik Indonesia di Era Digital ini untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pembajakan tersebut. Tantangan lainnya seperti persaingan dunia kerja yang sangat ketat beberapa perusahaan tidak banyak memakai karyawan akan tetapi menggunakan mesin-mesin atau alat elektronik yang berteknologi digital dan masih banyak lagi tantangan ekonomi yang akan dihadapi di era digital ini

b. Peluang Pengembangan Pelayanan antara lain :

1. Makin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan
2. Makin banyaknya perizinan yang diberikan wewenang kepada DPM&PTSP.

Guna memperoleh hypotesa sebagai acuan organisasi dalam menentukan langkah-langkah kedepan, perlu dilakukan analisis secara internal dan eksternal. Untuk hal itu dilakukan dengan SWOT Analysis sebagai berikut:

1. Faktor Internal meliputi hal-hal seperti :

a. Kekuatan (Strenghts), yaitu :

1. Goodwill dan Komitmen Pimpinan Daerah Visi dan misi yang jelas.
2. Pelayanan Perizinan dan non perizinan dengan Prinsip lebih cepat,mudah, transparan, dan berkualitas.
3. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan.
4. Kewenangan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu.

5. Jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu.

b. Kelemahan (Weaknesses), yaitu :

1. Belum tercerminnya penjabaran komitmen pimpinan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
2. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3. Kurangnya dukungan pemangku kepentingan dalam penerapan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan.
4. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan.
5. Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dengan tim teknis di SKPD dan belum terlaksananya Pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur DPM&PTSP Kabupaten Sumenep
6. Sarana dan prasarana belum terpenuhi dan memenuhi standart pelayanan minimal.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal pada **Peluang (Opportunities)**, yaitu Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah : Mewujudkan komitmen pemerintah dalam usaha perbaikan iklim berusaha di Kabupaten / Kota melalui peningkatan pelayanan administrasi perizinan yang *Totality Quality Management (TQM)*, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kemudian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang salah satu tujuannya adalah untuk membentuk profil dan perilaku aparatur yang memiliki integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab, kemampuan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta membangun birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel dan melayani masyarakat.

1. Kebijakan pemerintahan pusat dan daerah tersebut merupakan kesempatan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk membangun **“Komitmen Publik”** dengan menumbuhkan suasana yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan, jujur, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, rasa kepedulian yang tinggi, memberikan pelayanan pada masyarakat yang profesional dan terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), transparan dalam melaksanakan kegiatan serta memacu masyarakat untuk selalu memberikan masukan secara objektif ke arah pemecahan dan solusi dari persoalan yang dihadapi secara *“win-win solution”* yang bergerak ke arah kemajuan dan tidak berpolemik berkepanjangan.
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan merupakan salah satu lingkup utama dari perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya menjadi prioritas sinergitas dari kegiatan di DPM&PTSP untuk optimalisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
3. Penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan.
4. Mengoptimalkan koordinasi teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan mengikut sertakan partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan.
5. Perlu disusunnya usulan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan teknis pelayanan administrasi perizinan terpadu.

6. Menyelenggarakan program pembinaan dan peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, penerapan teknologi informasi berbasis komunikasi, pengembangan outlet-outlet pelayanan terpadu yang mendekatkan lokasi konsumen, pelayanan bergerak (*mobile service*) maupun dengan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen.

Selain analisis lingkungan eksternal adapun analisis lingkungan internal digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Dalam melakukan analisis lingkungan internal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, aspek-aspek yang dinilai adalah :

- Aspek penguatan kelembagaan perizinan;
- Aspek peningkatan pelayanan;
- Aspek peningkatan kompetensi aparatur DPM&PTSP;
- Aspek pengembangan sistem Pengawasan dan Pengendalian;
- Aspek penerapan teknologi informasi;
- Aspek sarana dan prasarana.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, kegiatan yang direncanakan ke depan diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPM&PTSP masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPM&PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi Pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sementara itu, bagi Pemerintah, keberadaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep diharapkan mampu :

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di SKPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.
2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak.
3. Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan.

4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan.

Dalam Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Aparatnya harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DPM&PTSP Kab sumenep, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan solusi / cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sebagai upaya mewujudkan masyarakat Sumenep yang adil dan sejahtera serta peningkatan peranserta masyarakat terhadap pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan, antara lain :

a. Permasalahan Internal:

- 1) Masih rendahnya kerjasama antar bidang dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan sebagai suatu lembaga yang berada satu atap.
- 2) Terbatasnya hasil research sebagai referensi perencanaan pembangunan yang transparan dan berkualitas.
- 3) Jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan produktivitas kerja, sehingga kurang mendukung keberhasilan suatu organisasi, akibat rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju.

b. Permasalahan external :

1. Belum sinerginya ketentuan pelayanan perizinan;
2. Belum optimalnya fungsi penegakan peraturan dibidang perizinan;
3. Belum adanya tim teknis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikarenakan tim teknis merupakan bagian unsur SKPD terkait yang masih melekat pada SKPD tersebut;

c. Permasalahan Pembangunan

1. Pencapaian investasi masih belum optimal;

2. Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA;
3. Ketersediaan fasilitas dan infrastuktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas;
4. Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah;
5. Belum adanya informs kebutuhan investasi;
6. Mekanisme monev perizinan belum optimal.

2. TELAAHAN VISI DAN MISI

a. Visi

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;

d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang termasuk dalam urusan penanaman modal, maka misi yang akan dilaksanakan adalah Misi Ketiga “

Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperdayakan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

dengan perincian sebagai berikut :

Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, **peningkatan daya tarik investasi**, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

Setelah ditentukan Visi, Misi Bupati Sumenep Tahun 2016-2021, selanjutnya ditentukan Tujuan, Sasaran beserta Indikator Kinerjanya, sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

RPJMD								
VISI	Misi		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
“SUPER MANTAP” Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional	3	Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	Meningkatkan kegiatan ekonomi, kualitas kelembagaan UMKM Koperasi dan pengembangan wisata daerah serta meningkatkan kinerja penanaman modal / investasi daerah, industri perdagangan	1	% Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal
				2	PDRB per kapita		2	Jumlah investor

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam merencanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPM&PTSP masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPM&PTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi Pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sementara itu bagi Pemerintah, keberadaan DPM&PTSP diharapkan mampu :

- Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di SKPD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.
- Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak.

- Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan.
- Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan.

Untuk mendorong semangat terhadap kinerja staf dan stake holders atau pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan perizinan, maka disepakati dan ditetapkan Motto Pelayanan yaitu :

1. ***Prima dalam pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan.***
2. ***Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap“ (Jelas, Mudah, Singkat, Sederhana dan tuntas guna mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera, Pemerintahan yang mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan professional)***

3. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI DAN KABUPATEN

Telaahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPM&PTSP berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2013-2018 adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak, yang dijabarkan dengan misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Dengan rincian tujuan sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja

- 1.2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan
- 1.3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 1.4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan
- 2.1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi
- 2.2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
- 2.3. Meningkatkan ketahanan pangan
- 2.4. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri
- 2.5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri
- 2.6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
- 2.7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah
- 2.8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- 3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya
- 3.2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan
- 4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik
- 5.1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
- 5.2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
- 5.3. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom)
- 5.4. Meningkatkan penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan

4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

a. RTRW KABUPATEN

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan RTRW Kabupaten sumenep, IMB maupun izin usaha apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Bappeda ataupun Cipta Karya dan Tata Ruang tidak akan merekomendasikan untuk diterbitkan izin

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007.

Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sumenep haruslah juga memperhatikan konsep penataan ruang daerah yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumenep yang memiliki visi “Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura”. Dokumen RTRW dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penataan pola ruang daerah didalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021, dimana Kebijakan Strategis RTRW Kabupaten Sumenep meliputi 10 kebijakan diantaranya :

1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja

Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumenep secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan.

Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor perekonomian antara lain :

1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya;
2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya;
4. Tanggapan dan tindaklanjut (Respons) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pengaduan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan disusun sebagai penjabaran dan mempertimbangkan keberlanjutan dari penetapan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi, dengan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sumenep, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui visinya, adalah **SUPER MANTAP**.

Dengan berpedoman pada visi dan misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja RENSTRA

RENSTRA					
TUJUAN			SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1 Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal	1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
		- Nilai Investasi PMDN			- Nilai Investasi PMDN
		- Nilai Investasi PMA			- Nilai Investasi PMA
	2	Jumlah investor	2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor

2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi merupakan langkah–langkah yang berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning proces*).

Sedangkan strategi dalam RENSTRA untuk mewujudkan tujuan pada Misi 3 sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 6
Strategi RENSTRA 2016-2021

RENSTRA					STRATEGIS		
TUJUAN		SASARAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal			1	Menciptakan kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan)	
		- Nilai Investasi PMDN					
		- Nilai Investasi PMA					
		1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			
				- Nilai Investasi PMDN			
				- Nilai Investasi PMA			
	2	Jumlah investor			1	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah	
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor			2

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, dimana melalui arah kebijakan dapat menterjemahkan program kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan–permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Arah Kebijakan RENSTRA 2016-2021

RENSTRA				STRATEGIS	Arah Kebijakan									
TUJUAN		SASARAN			Pernyataan	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA											
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal		1	Menciptakan kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan)	1	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan	√	√	√	√	√	√	
		- Nilai Investasi PMDN				2	Meningkatkan pembinaan evaluasi PMDN	√	√	√	√	√	√	
		- Nilai Investasi PMA					3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	√	√	√	√	√	√
			1	Meningkatnya nilai investasi			4	Meningkatkan pelayanan melalui npelayanan bergerak (mobile service)	√	√	√	√	√	√
							5	Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen	√	√	√	√	√	√

RENSTRA				STRATEGIS	Arah Kebijakan									
TUJUAN		SASARAN			Pernyataan	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA											
	2	Jumlah investor		1	Mewujudkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah	1	Mengembangkan potensi investasi daerah	√	√	√	√	√	√	
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	2	Mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan	2	Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi	√	√	√	√	√	√
						3	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	√	√	√	√	√	√	

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 8
 Daftar Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
A	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9		Penyediaan Makanan dan Minuman
10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12		Pameran Pembangunan
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	
1		Pembangunan Gedung Kantor
2		Pengadaan Kendaraan / Operasional
3		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN
4		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5		Pengadaan Meubeleir
6		Pengadaan Komputer
7		Pengadan Alat'-alat Studio dan Komunikasi
8		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
9		Pemeliharaan Rutin / rkala Kendaraan dinas/operasional
10		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
12		Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubiler
13		Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer
14		Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
15		Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telphon
15		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2		Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1		Pendidikan dan pelatihan formal
2		Penyusunan rencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	
1		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
2		Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD
F	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1		Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
G	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
1		Pengembangan Potensi Investasi Daerah
H	Program Pengembangan Data / Informasi	
1		Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep
2		Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu
3		Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Sumenep
4		Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
I	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
1		Pengembangan Potensi Investasi Daerah
J	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1		Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
2		Penyusunan Potensi Perizinan Kab. Sumenep
3		Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep
K	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	
1		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin
2		Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan
3		Ketatalaksanaan perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan
4		Ketatalaksanaan Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB)
5		Pelayanan perizinan perusahaan tembakau
6		Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
7		Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM	KEGIATAN
8		Sertifikasi manajemen mutu ISO. 900 : 2008
9		Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan
L	Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan	
1		Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
2		Publikasi peraturan Perundang-undangan
3		Sosialisasi perizinan
4		Penataan dan Penertiban Perizinan
5		Penyusunan standart pelayanan publik (SPP) dan standart operating prosedur (SOP)
6		Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan
M	Program Perencanaan Dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal	
1		Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PMA/PMDN

5.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2016 - 2021, dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Kabupaten Sumenep. Indikator kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran berikut.

Tabel 9
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1 Jumlah nilai investasi penanaman modal	1 Meningkatkan nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	A Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	92 Perundang-undangan Perizinan	92 Perundang-undangan Perizinan	92 Perundang-undangan Perizinan	92 Perundang-undangan Perizinan	92 Perundang-undangan Perizinan	92 Perundang-undangan Perizinan
	- Nilai Investasi PMDN		- Nilai Investasi PMDN	1 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	Terseleenggaranya monitoring tempat usaha	62 Tempat Usaha	62 tempat usaha	63 tempat usaha	69 Tempat Usaha	75 Tempat Usaha	82 Tempat Usaha
	- Nilai Investasi PMA		- Nilai Investasi PMA	2 Publikasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan Melalui Media Massa	3 media massa	3 media massa	4 media massa	4 media massa	4 media massa dan 1 paket vidiotron	4 media massa
				3 Sosialisasi perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perizinan		15 Perundang-Undangan	15 Perundang-Undangan	14 Perundang-Undangan	14 Perundang-Undangan	14 Perundang-Undangan
				4 Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah rekomendasi peringatan penertiban usaha	Terlaksananya kegiatan Penataan dan Penertiban Perizinan			20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi
				5 Penyusunan standart pelayanan publik (SPP) dan standart operating prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP Perizinan	Terlaksananya penyusunan SOP Perizinan		28 SOP Perizinan				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				6	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	Jumlah kecamatan pelaksana PATEN	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan			7 kecamatan				
				B	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Terselenggaranya penelitian berkas permohonan perizinan	4.090 permohonan izin	5.129 permohonan izin	5.642 permohonan izin	4.578 permohonan izin	5.036 permohonan izin	5.540 permohonan izin	
				2	Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	Jumlah rapat pembahasan kajian teknis	Terlaksananya rapat pembahasan kajian teknis	100 kegiatan	100 kegiatan	88 kegiatan	96 kegiatan	105 kegiatan	114 kegiatan	
						Jumlah survey tinjauan lapangan	Terlaksananya survey tinjauan lapangan	51 kegiatan	51 kegiatan	30 kegiatan	33 kegiatan	36 kegiatan	39 kegiatan	
				4	Ketatalaksanaan perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	Jumlah sertifikat perizinan	Terselenggaranya pengadaan sertifikat perizinan	7.630 lembar Sertifikat Perizinan	7.630 lembar Sertifikat Perizinan	7.630 lembar Sertifikat Perizinan	8.317 lembar Sertifikat Perizinan	9.066 lembar Sertifikat Perizinan	9.882 lembar Sertifikat Perizinan	
				5	Ketatalaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Terlaksananya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	421 izin	473 izin	473 izin	448 izin	493 izin	543 izin	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				6	Pelayanan perizinan perusahaan tembakau	Jumlah izin perusahaan tembakau yang diterbitkan	Terlaksananya penerbitan Izin perusahaan tembakau	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
				7	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Jumlah Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan	Terlaksananya perizinan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
				8	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah PNS Tenaga Teknis pada front office Pelayanan Perizinan	Jumlah PNS Tenaga Teknis pada front office Pelayanan Perizinan			6 PNS Tenaga Teknis	6 PNS Tenaga Teknis	6 PNS Tenaga Teknis	6 PNS Tenaga Teknis
						Jumlah Komputer Note Book yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Komputer Note Book			6 unit			
						Jumlah Printer yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Printer			6 unit			
						Jumlah Meja Kerja yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja			6 unit			
						Jumlah Kursi Kerja yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja			6 unit			
						Jumlah Sound Sistem Rapat yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Sound Sistem Rapat			1 paket			
						Jumlah HP Tab yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan HP Tab			6 unit			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				9	Sertifikasi manajemen mutu ISO. 900 : 2008	Jumlah dokumen hasil penilaian manajemen mutu ISO 900:2008	Diraihnya predikat pelayanan yang bersertifikat ISO 900:2008	-		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
				10	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui Pelayanan Perizinan Kepulauan	Terlaksananya pelayanan perizinan di kecamatan kepulauan	-	35 izin		35 izin	35 izin	35 izin	
				C	Program Perencanaan Dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai berinvestasi	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065	481.620.593.307	
					Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PMA/PMDN	Jumlah PMDN yang dibina	Terlaksananya pembinaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			30 PMDN	30 PMDN	30 PMDN	30 PMDN	
2	Jumlah investor	2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	A	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	4.090 pengusaha	5.129 pengusaha	5.642 pengusaha	4.295 pengusaha	4.725 pengusaha	4.993 pengusaha

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Potensi Investasi	Terselenggaranya Pameran Promosi		2 kegiatan					
				B	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	4.090 pengusaha	5.129 pengusaha	5.642 pengusaha	4.295 pengusaha	4.725 pengusaha	4.993 pengusaha	
				1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Potensi Investasi	Terselenggaranya Pameran Promosi		2 kegiatan					
				C	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	
				1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Terlaksananya penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi		50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	
						Audio Visull Potensi Unggulan	Terlaksananya pengadaan software Audio Visull Potensi Unggulan			2 paket	2 paket			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Bulanan / Tahunan Perizinan dan Investasi							
					Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Perizinan dan Investasi		35 buku	44 buku	44 buku	44 buku	44 buku	44 buku	
					Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Perizinan dan Investasi		12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	
				3	Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Sumenep		50 ekp	55 ekp	60 ekp	65 ekp	70 ekp	75 ekp	
				4	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	Terlaksananya penerbitan Izin Prinsip	9 izin	11 izin	11 izin	4 izin	5 izin	5 izin
				D	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Informasi	(SIMTUP)							
				1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik		Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dengan mobil pelayanan perizinan keliling	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP	1 SIMTUP
						Jumlah Modul Pengadaan Aplikasi Dashboard Perizinan Terpadu yang dibeli			1 aplikasi				
						Jumlah Modul Aplikasi Anti Virus yang dibeli			6 aplikasi				
						Jumlah Instalasi Listrik yang dibeli			1 unit				
				2	Penyusunan Potensi Perizinan Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Potensi Perizinan Kab. Sumenep	Terlaksananya penyusunan Potensi Perizinan Kab. Sumenep				40 buku		40 buku
				3	Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep	Terlaksananya penyusunan Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				A	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pemenuhan sarana layanan perkantoran	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Terselenggaranya pengadministrasian surat menyurat	1.600 surat	1.600 surat	1.700 surat	1.870 surat	1.988 surat	2.187 surat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga kerja Non PNS	Terselenggaranya pengadaan Tenaga kerja Non PNS	8 orang	8 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang
				4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pengadaan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	728 buah	728 buah	728 buah	801 buah	881 buah	969 buah
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item Alat Tulis Kantor yang dibeli	Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor	25 item	25 item	25 item	25 item	25 item	25 item
				6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
						penggandaan						
					Jumlah Barang Penggandaan		78.506 lembar foto copy	78.506 lembar foto copy	78.506 lembar foto copy	86.357 lembar foto copy	94.993 lembar foto copy	104.492 lembar foto copy
				7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Terselenggaranya pengadaan komponen listrik	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/majalah/tabloit yang disediakan	Terselenggaranya berlangganannya surat kabar/majalah/tabloit	72 exemplar	72 exemplar	72 exemplar	72 exemplar	72 exemplar
						Jumlah iklan ucapan selamat				20 iklan ucapan	22 iklan ucapan	24 iklan ucapan
				9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Terselenggaranya pengadaan makanan dan minuman	1.000 kotak	750 kotak	750 kotak	825 kotak	908 kotak
				10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 kegiatan	12 kegiatan	13 kegiatan	15 kegiatan	17 kegiatan
				11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	66 kegiatan	73 kegiatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				12	Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan				
				B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Beserta Pemeliharaannya	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
				1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dibangun	Terlaksananya pembangunan gedung kantor		1 unit		1 unit		1 unit
				2	Pengadaan Kendaraan / Operasional	Jumlah unit kendaraan/operasional yang dibeli	Terlaksananya pembelian kendaraan/operasional		2 unit roda 4		1 unit	1 unit	1 unit
				3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantoryang dibeli	Terlaksananya pembelian Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit AC	1 unit Almari, 2 unit AC, 1 paket CCTV, 2 unit Meja Rapat, 20 unit Kursi Rapat, 1 unit Kursi Tamu, 1 paket Horden, 2 unit TV		1 unit Genset, 3 unit AC split, 2 AC duduk, 3 almari	2 unit AC duduk	5 unit Kulkas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Terlaksananya pembelian Peralatan Gedung Kantor				1 unit Running Teks, 1 unit papan tulis elektronik	2 unit Papan Pengumuman	1 unit Papan Tulis Elektronik
				5	Pengadaan Meubeleir	Jumlah unit Meubeleir yang dibeli	Terlaksananya pembelian Meubeleir	21 unit kursi rapat			3 paket Meja Kursi Tamu, 10 meja bundar, 50 kursi rapat, 3 meja pimpinan, 5 kursi pimpinan	3 kursi tunggu deret	20 kursi rapat
				6	Pengadaan Komputer	Jumlah unit Komputer yang dibeli	Terlaksananya pembelian Komputer				6 unit Komputer PC, 6 unit Printer	4 unit Komputer Note Book	4 unit Printer
				7	Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Jumlah unit Alat-alat Studio dan Komunikasi yang dibeli	Terlaksananya pembelian Alat-alat Studio dan Komunikasi				2 unit Banner Neon, 1 paket sound system	1 unit camera	1 unit handycam
				8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah area gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 area	1 area	1 area	1 area	1 area	1 area
				9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 unit roda 4	5 unit roda 4	5 unit roda 4	5 unit roda 4	5 unit roda 4	7 unit roda 4
						Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara		11 unit roda 2	11 unit roda 2	11 unit roda 2	11 unit roda 2	11 unit roda 2	11 unit roda 2

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor			53 unit	53 unit	66 unit	68 unit
				11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung kantor	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	22 unit	25 unit
				12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubiler	Jumlah Meubelair Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Meubelair	167 unit	167 unit	167 unit	167 unit	241 unit	244 unit
				13	Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer	Jumlah Komputer Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Komputer	54 unit	54 unit	54 unit	54 unit	73 unit	77 unit
				14	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi				16 unit	21 unit	22 unit

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				15	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telphon	Jumlah Jaringan Air, Listrik dan Telphon Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telphon				1 paket	1 paket	1 paket
				16	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit gedung di rehab	Terlaksananya rehab gedung				1 unit		
				C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dalam Berpakaian Dinas	Meningkatnya tingkat kedisiplinan Pegawai	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terseleenggaranya pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	36 stel	38 stel				
				2	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu	Terseleenggaranya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			35 stel	35 stel	38 stel	42 stel
				D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Meningkatnya Profesionalisme Pegawai	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai negeri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat/pelatihan	4 orang	7 orang	8 orang	9 orang	10 orang	11 orang
				2	Penyusunan rencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
						Jumlah dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
				E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
						Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja	Terlaksananya penyusunan Dokumen pelaporan kinerja	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
						Jumlah dokumen Hasil Pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Hasil Pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
						Jumlah Dokumen Pencatatan Aset	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pencatatan Aset	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen
						Jumlah Dokumen laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan Dokumen laporan keuangan	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen
				2	Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	TARGET KINERJA						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				F	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Stand Pameran DPM&PTSP	Meningkatnya informasi hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
				1	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

5.3 KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan / pagu indikatif adalah merupakan estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, baik kegiatan rutin SKPD maupun kegiatan pembangunan yang menjadi bagian tugas dan fungsi SKPD sebagaimana terlampir dalam Lampiran berikut

Tabel 10

KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal	1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	A	Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	165.000.000	306.438.900	489.588.450	432.978.300	1.428.276.200	523.903.900
	-	Nilai Investasi PMDN	-	Nilai Investasi PMDN	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	Terseleenggaranya monitoring tempat usaha	120.000.000	135.000.000	148.500.000	163.350.000	179.685.000	197.653.500	
	-	Nilai Investasi PMA	-	Nilai Investasi PMA	2	Publikasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan Melalui Media Massa	45.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	991.930.000	43.923.000	
					3	Sosialisasi perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perizinan		49.395.000	92.116.550	101.328.300	111.461.200	122.607.400	
					4	Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah rekomendasi peringatan penertiban usaha	Terlaksananya kegiatan Penataan dan Penertiban Perizinan			120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	
					5	Penyusunan standart pelayanan publik (SPP) dan standart operating	Jumlah Dokumen SOP Perizinan	Terlaksananya penyusunan SOP Perizinan	-	92.043.900					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					prosedur (SOP)								
				6	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan	Jumlah kecamatan pelaksana PATEN	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kecamatan			95.971.900			
				B	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	333.063.500	561.320.000	698.730.000	740.678.000	784.959.600	848.455.560
				1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Terselenggaranya penelitian berkas permohonan perizinan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	23.100.000	25.410.000	27.951.000
				2	Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	Jumlah rapat pembahasan kajian teknis	Terlaksananya rapat pembahasan kajian teknis	151.050.000	122.200.000	134.420.000	147.862.000	147.862.000	162.648.200
						Jumlah survey tinjauan lapangan	Terlaksananya survey tinjauan lapangan						
				4	Ketatalaksanaan perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	Jumlah sertifikat perizinan	Terselenggaranya pengadaan sertifikat perizinan	47.902.500	53.225.000	58.547.500	64.402.250	70.842.475	77.926.723

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				5	Ketatalaksanaan Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Terlaksananya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	65.775.000	65.775.000	72.352.500	79.587.750	87.546.525	96.301.178
				6	Pelayanan perizinan perusahaan tembakau	Jumlah izin perusahaan tembakau yang diterbitkan	Terlaksananya penerbitan Izin perusahaan tembakau	20.600.000	20.600.000	22.660.000	24.926.000	27.418.600	30.160.460
				7	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Jumlah Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan	Terlaksananya perizinan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	26.736.000	78.000.000	78.000.000	85.800.000	94.380.000	103.818.000
				8	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah PNS Tenaga Teknis pada front office Pelayanan Perizinan	Jumlah PNS Tenaga Teknis pada front office Pelayanan Perizinan			161.750.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
						Jumlah Komputer Note Book yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Komputer Note Book						
						Jumlah Printer yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Printer						
						Jumlah Meja Kerja yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja						
						Jumlah Kursi Kerja yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja						
						Jumlah Sound Sistem Rapat yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan Sound Sistem Rapat						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Jumlah HP Tab yang dibeli	Terlaksananya Pengadaan HP Tab							
				9	Sertifikasi manajemen mutu ISO. 900 : 2008	Jumlah dokumen hasil penilaian manajemen mutu ISO 900:2008	Diraihnya predikat pelayanan yang bersertifikat ISO 900:2008	-	-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000
				10	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui Pelayanan Perizinan Kepulauan	Terlaksananya pelayanan perizinan di kecamatan kepulauan		200.520.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000
				C	Program Perencanaan Dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai berinvestasi	0	0	65.011.000	65.011.000	65.011.000	65.011.000
					Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PMA/PMDN	Jumlah PMDN yang dibina	Terlaksananya pembinaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			65.011.000	65.011.000	65.011.000	65.011.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2 Jumlah investor	2 Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	A	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	0	206.591.000	0	0	0	0	0
				1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Potensi Investasi	Terselenggaranya Pameran Promosi	-	206.591.000					
				B	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	0	0	216.920.550	227.766.578	239.154.906	251.112.652	
				1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Potensi Investasi	Terselenggaranya Pameran Promosi			216.920.550	227.766.578	239.154.906	251.112.652	
				C	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	57.550.000	131.904.500	202.874.950	169.984.445	180.554.890	192.182.378	
				1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Terlaksananya penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi		40.000.000	106.780.000	64.280.000	64.280.000	64.280.000	64.280.000
						Audio Visull Potensi Unggulan	Terlaksananya pengadaan software Audio Visull Potensi Unggulan							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
				2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Bulanan / Tahunan Perizinan dan Investasi	27.550.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
					Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Perizinan dan Investasi							
					Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Perizinan dan Investasi							
				3	Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Sumenep		30.000.000	19.914.000	21.905.400	24.095.940	26.505.534	29.156.087
				4	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	0	21.990.500	24.189.550	26.608.505	29.269.356	32.196.291

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				D	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Jaringan Sistem Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	0	1.406.994.100	796.243.415	940.147.757	963.454.532	1.124.079.985
				1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik		Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dengan mobil pelayanan perizinan keliling		1.306.994.100	686.243.415	754.867.757	830.354.532	913.389.985
						Jumlah Modul Pengadaan Aplikasi Dashboard Perizinan Terpadu yang dibeli							
						Jumlah Modul Aplikasi Anti Virus yang dibeli							
						Jumlah Instalasi Listrik yang dibeli							
				2	Penyusunan Potensi Perizinan Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Potensi Perizinan Kab. Sumenep	Terlaksananya penyusunan Potensi Perizinan Kab. Sumenep				64.280.000		64.280.000
				3	Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep	Jumlah dokumen Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep	Terlaksananya penyusunan Validasi dan sinkronisasi data perizinan Kab. Sumenep		100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				A	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pemenuhan sarana layanan perkantoran	404.774.500	404.101.500	417.011.650	458.712.815	504.584.097	555.042.506
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Terselenggaranya pengadministrasian surat menyurat	14.520.000	15.972.000	17.569.200	19.326.120	21.258.732	23.384.605
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108.450.000	119.295.000	131.224.500	144.346.950	158.781.645	174.659.810
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga kerja Non PNS	Terselenggaranya pengadaan Tenaga kerja Non PNS	87.905.500	87.905.500	96.696.050	106.365.655	117.002.221	128.702.443
				4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya pengadaan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	11.530.000	11.530.000	12.683.000	13.951.300	15.346.430	16.881.073
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item Alat Tulis Kantor yang dibeli	Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor	24.109.000	24.109.000	26.519.900	29.171.890	32.089.079	35.297.987
				6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan penggandaan	25.584.900	25.584.900	28.143.390	30.957.729	34.053.502	37.458.852
						Jumlah Barang Penggandaan							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Terselenggaranya pengadaan komponen listrik	11.500.000	6.260.000	6.886.000	7.574.600	8.332.060	9.165.266
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/majalah/tabloit yang disediakan	Terselenggaranya berlangganan surat kabar/majalah/tabloit	9.994.600	9.994.600	10.994.060	12.093.466	13.302.813	14.633.094
						Jumlah iklan ucapan selamat							
				9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Terselenggaranya pengadaan makanan dan minuman	11.250.000	11.250.000	12.375.000	13.612.500	14.973.750	16.471.125
				10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49.930.500	52.200.500	57.420.550	63.162.605	69.478.866	76.426.752
				11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20.000.000	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500
				12	Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	30.000.000	25.000.000				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Beserta Pemeliharaannya	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	199.209.100	1.163.626.015	128.525.650	1.717.378.215	515.597.337	826.885.820
				1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dibangun	Terlaksananya pembangunan gedung kantor		300.000.000		300.000.000		300.000.000
				2	Pengadaan Kendaraan / Operasional	Jumlah unit kendaraan/operasional yang dibeli	Terlaksananya pembelian kendaraan/operasional		675.000.000		300.000.000	220.000.000	220.000.000
				3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantoryang dibeli	Terlaksananya pembelian Perlengkapan Gedung Kantor	28.167.300	74.660.000		310.000.000	30.000.000	20.000.000
				4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Terlaksananya pembelian Peralatan Gedung Kantor				110.000.000	10.000.000	50.000.000
				5	Pengadaan Meubeleir	Jumlah unit Meubeleir yang dibeli	Terlaksananya pembelian Meubeleir	11.697.000			115.000.000	15.000.000	14.000.000
				6	Pengadaan Komputer	Jumlah unit Komputer yang dibeli	Terlaksananya pembelian Komputer				78.000.000	40.000.000	12.000.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				7	Pengadaan Alat'-alat Studio dan Komunikasi	Jumlah unit Alat'-alat Studio dan Komunikasi yang dibeli	Terlaksananya pembelian Alat'- alat Studio dan Komunikasi				90.000.000	15.000.000	10.000.000
				8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah area gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	77.348.200	32.341.500	35.575.650	39.133.215	43.046.537	47.351.190
				9	Pemeliharaan Rutin / rkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	61.800.000	61.800.000	67.980.000	74.778.000	82.255.800	90.481.380
						Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara							
				10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor			4.829.000	5.311.900	6.375.000	6.566.250
				11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung kantor	4.997.000	4.564.515	5.079.000	5.586.900	5.700.000	6.498.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubiler	Jumlah Meubelair Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Meubelair	5.214.000	5.260.000	5.062.000	5.568.200	7.300.000	7.373.000
				13	Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer	Jumlah Komputer Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Komputer	9.985.600	10.000.000	10.000.000	22.000.000	27.720.000	29.106.000
				14	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi				5.000.000	6.200.000	6.510.000
				15	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telphon	Jumlah Jaringan Air, Listrik dan Telphon Yang Tercantum Dalam Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telphon				7.000.000	7.000.000	7.000.000
				16	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit gedung di rehab	Terlaksananya rehab gedung				250.000.000		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dalam Berpakaian Dinas	Meningkatnya tingkat kedisiplinan Pegawai	19.290.000	12.730.000	17.500.000	19.250.000	21.175.000	23.292.500
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terselenggaranya pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	19.290.000	12.730.000				
				2	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu	Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			17.500.000	19.250.000	21.175.000	23.292.500
				D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Meningkatnya Profesionalisme Pegawai	21.649.731	30.000.000	31.000.000	34.100.000	37.310.000	40.641.000
				1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai negeri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat/pelatihan	11.649.731	20.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000
				2	Penyusunan rencana, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Jumlah dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah							
				E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	22.000.000	20.586.800	21.586.800	22.686.800	24.955.480	27.451.028
					Persentase Penyelesaian Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
				1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja	Terlaksananya penyusunan Dokumen pelaporan kinerja	11.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000
					Jumlah dokumen Hasil Pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Hasil Pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	INDIKATOR OUTCOM	PAGU INDIKATIF (Rp.)						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Jumlah Dokumen Pencatatan Aset	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pencatatan Aset							
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran							
					Jumlah Dokumen laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan Dokumen laporan keuangan							
				2	Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD	11.000.000	10.586.800	10.586.800	10.586.800	11.645.480	12.810.028
				F	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Stand Pameran DPM&PTSP	Meningkatnya informasi hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat	0	0	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500
				1	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan			27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASARKAN TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Organisasi untuk memperoleh hasil organisasi yang berprestasi di masa mendatang sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 11
Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA

RENSTRA				SATUAN	TARGET KINERJA							
TUJUAN		SASARAN			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA									
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal										
		- Nilai Investasi PMDN			rupiah	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065	481.620.593.307	
		- Nilai Investasi PMA			rupiah	5.010.000.000	5.015.030.000	5.020.060.120	5.025.100.301	5.030.150.602	5.050.301.506	
			1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi							
					- Nilai Investasi PMDN	persentase	3,10	3,10	3,39	3,37	3,43	3,49
					- Nilai Investasi PMA	persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Jumlah investor		orang	4.663	5.129	5.642	4.295	4.725	4.993	
			2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	persentase	10,00	9,99	10,00	10,00	10,01	10,03

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016– 2021 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan tersusunnya Renstra DPM&PTSP Kabupaten Sumenep diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategis DPM&PTSP mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pengembangannya sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan . Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terwujud sinkronisasi dan sinergisitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Sumenep serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia umumnya.

Dalam implimentasinya Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik apabila :

1. Tercukupinya SDM Aparatur.
2. Sarana dan Prasarana memenuhi standart pelayanan minimal.
3. Tercukupinya dana anggaran kegiatan pelayanan publik.
4. Adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perizinan.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini kami ucapkan terima kasih.

Sumenep, Desember 2016

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661108 198809 1 001